



Jurnal Kalacakra

Volume 02, Nomor 02, 2021, pp: 75-84

ISSN: p-ISSN-2723-7389 e-ISSN 2723-7397

e-mail: jumalkalacakra@untidar.ac.id, website: <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/kalacakra/index>

PERAN ULAMA SEPUH MAGELANG DALAM MEWUJUDKAN INTEGRASI NASIONAL

Delfiyan Widiyanto^{1a)}, Yasnanto^{2b)}

¹²FKIP, Jalan Kapten Suparman No. 39 Potrobangsaan, Magelang Utara, Kota Magelang

e-mail: ^{a)}delfiyanwidiyanto@untidar.ac.id, ^{b)}yasnanto@untidar.ac.id

Received: 31 Juni 2021

Revised: 28 Agustus 2021

Accepted: 4 September 2021

ABSTRAK

Gagasan negara Islam dan pendirian negara berdasarkan Islam seringkali menjadi isu disintegrasi bangsa. Kelompok-kelompok ini tidak mengakui keberadaan Pancasila dan negara, sehingga dapat mengancam kebhinekaan Indonesia. Harmonisasi agama dan negara terganggu, bisa memecah belah pertahanan bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran ulama sepuh Magelang dalam mewujudkan toleransi, kerukunan, toleransi, dan integrasi bangsa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Ulama Tua di Magelang khususnya di Pondok Pesantren Darussalam memiliki peran dalam hal sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, penguatan ideologi negara, dan pengaruh Ulama dalam memahami pluralisme dan multikulturalisme.

Kata Kunci: *Peran Ulama, Integrasi Nasional*

ABSTRACT

The notion of an Islamic state and the establishment of a state based on Islam are often issues of national disintegration. These groups do not recognize the existence of Pancasila and the state, so that it can threaten the diversity of Indonesia. Harmonization between religion and the state is disturbed, it can divide the defense of the nation. This study aims to determine the role of the older ulama of Magelang in realizing tolerance, harmony, tolerance, and national integration. This study uses a descriptive research method with a qualitative approach. Collecting data by interview, documentation, and observation. The results of the study show that the role of the older Ulama in Magelang, especially in the Darussalam Islamic boarding school, has a role in terms of the history of the struggle for independence of the Indonesian nation, strengthening state ideology, and the influence of Ulama in understanding pluralism and multiculturalism.

Keywords: *The Role of Ulama, National Integration*

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia terdiri ragam suku, budaya, bahasa, ras, dan latar belakang. Kemerdekaan Indonesia tidak terlepas perjuangan pahlawan-pahlawan perjuangan kemerdekaan dari daerah-daerah. Berkat rasa senasib seperjuangan, kesamaan tujuan, dan keinginan bersatu menjadikan integrasi bangsa Indonesia.

Keragaman agama dan budaya di Indonesia telah lama ada di Negara Indonesia. Berdasarkan kitab Sutasoma karangan Mpu Tantular bahwa "*Bhineka Tunggal Ika tan Hana Dharma Mangrwa*", berbeda-beda namun satu, tiada kebenaran yang mendua (Tantular, 2009: 505). Indonesia dapat harmoni dan damai dengan adanya toleransi antar agama dan memperkecil doktrin radikal, sehingga terdapat hubungan harmonis antara agama dan negara.

Keragaman agama dan budaya memiliki potensi konflik yang dapat melemahkan integrasi nasional. Catatan sejarah terjadi terdapat gerakan DI/TII yang dipimpin oleh Kartosuwiryo pada tahun 1949. Gerakan ini melakukan pemberontakan darul islam/tentara Islam Indonesia. Ketidakpuasan Kartisuwiryo terhadap pemerintah Indonesia yang dinilai lemah, karena kemerdekaan Indonesia masih dibayangi Belanda. Kemudian Kartosuwiryo mendirikan NII (negara islam Indonesia) dan angkatan bersenjata NII. Tujuan dari TII (tentara Islam Indonesia) memerangi TNI dan dapat memisahkan diri dari Indonesia.

Pola paham negara islam dan pendirian negara berasaskan islam kerap menjadi isu disintegrasi nasional. Kelompok-kelompok ini tidak mengakui adanya Pancasila dan negara, sehingga dapat mengancam kebhinekaan Indonesia. Harmonisasi antara agama dengan negara menjadi terganggu, dapat memecah bela bangsa. Kelompok-kelompok yang pernah berkembang di

Indonesia, diantaranya Front Pembela Islam, Hizbut Tahrir Indonesia, Jamaah Ansarut Tauhit, Majelis Mujahidin Indonesia, Aliansi Nasional anti syiah, dan jamaah Islamiah (Liputan 6, Januari 2021). Kelompok-kelompok ini dinilai oleh negara termasuk radikal dan ada kaitannya dengan negara khilafah. Jelas ini menunjukkan adanya gerakan separatisme yang mengancam negara kesatuan republik Indonesia. Selain itu, tuduhan tersebut pernah diarahkan pada organisasi masyarakat besar seperti NU dan Muhammadiyah dalam laporan *human right watch* (Laporan *Human Right Watch*, 2013: 17).

Paham religious dan nasionalisme memiliki hubungan yang saling berkesinambungan, menurut Emerson (1960: 158) bahwa nasionalisme bergerak dan menyelimuti Asia telah membawa agama juga bergerak maju. Soepomo pernah mengungkapkan dalam pidato pada 31 Maret 1945 bahwa mendirikan negara Islam di Indonesia, tidak akan mendirikan negara persatuan. Pendirian negara Islam akan mempersatukan diri dengan golongan tersebar yaitu islam, agama lain tidak dapat mempersatukan dengan negara (Latif, 2017: 71).

Pada perkembangannya terdapat permasalahan yang muncul saat ini yaitu tidak harmonis hubungan antar agama akibat sisi negatif dari *religious diversity*. Masing-masing agama memiliki eksklusif dogma yang diajarkan oleh masing-masing agama, apabila itu menyigung agama lain maka dapat dianggap penistaan agama yang diatur dalam KUHP 156a dan UU penodaan agama. Hal tersebut perlu diwaspadai dalam kehidupan keagamaan. Penyelesaian paham agama dengan negara tidak dapat diselesaikan secara langsung menggunakan hukum. Perlu adanya pendekatan secara ilmu pengetahuan agama dan negara, sehingga radikalisme dan

terorisme dapat dihilangkan, sehingga terjalin keharmonisan dan kerukunan.

Untuk membatasi dampak buruk keterlibatan agama diruang publik, perlukan hubungan antara agama dan negara yang mendukung toleransi kembar. Demokratisasi terletak pada konstruksi dan rekonstruksi politik yang secara kontinyu mengembangkan toleransi kembar. Menurut Latif (2017: 101) toleransi kembar yang dimaksud adalah situasi ketika institusi agama dan negara menyadari batas otoritas kemudian mengembangkan toleransi terhadap fungsinya masing-masing.

Kepedulian Pancasila dalam kerangka ketuhanan berupa kebebasan seseorang secara pribadi agama, namun dalam kehidupan publik harus tetap menghormati nilai-nilai ketuhanan (keagamaan). Seorang warga negara tidak diperbolehkan menyebarkan propaganda untuk menolak dan membenci agama.

Ulama sebagai seorang yang memiliki ilmu pengetahuan tinggi terhadap agama dapat berkontribusi untuk menjaga kedaulatan negara, hal tersebut dikarenakan ulama sangat dekat dengan masyarakat dan menjaga umat. Perlunya ulama dalam bela negara untuk dapat memiliki sumbangsih dalam kehidupan bernegara. Menurut Winarno (2013: 182) bahwa upaya setiap warga negara republik Indonesia terhadap ancaman, baik, dari dalam dan luar negeri disebut bela negara.

Peran dan fungsi ulama terdapat berbagai hal. Menurut Hasyim (1998: 134) peran dan fungsi ulama adalah pewaris para nabi, pembina dan penjaga umat, pengontrol penguasa, dan sumber ilmu ulama adalah orang yang fakih dalam masalah halal dan haram. Peran ulama juga dalam memberikan kerukunan, keharmonisan yang menciptakan integrasi nasional.

Integrasi nasional berupa penyatuan unsur bangsa menjadi satu kesatuan. Integrasi nasional menurut Baton (2010: 166) adalah proses interaktif antara perilaku penduduk mayoritas terhadap minoritas dengan setiap perubahan perilaku minoritas tidak mengurangi perbedaan kelompok. Integrasi nasional berupa penyatuan penduduk dari kelompok besar dan kelompok kecil menjadi satu. Pendapat berbeda dikemukakan oleh Birch (2012: 8) integrasi nasional berupa penyatuan bersama komunitas secara historis secara nasional. Penyatuan nasional berdasarkan esensi sejarah dari tingkat daerah dan internasional, kemudian penyatuan komunitas. Pada perkembangannya penyatuan komunitas menjadi satu dari perkembangan ekonomi, sosial, politik, maka penyatuan tergolong dalam integrasi politik.

Integrasi nasional berupa penyatuan budaya minoritas kepada negara. Kelompok minoritas memiliki perbedaan dengan kelompok mayoritas, sehingga terkadang kelompok minoritas menjadi kendala dalam integrasi nasional. Berbagai negara memiliki kelompok minoritas seperti Portugal, Belanda, Amerika Serikat, dll. Negara Cina menjadi negara yang mengintegrasikan kelompok minoritas dengan baik. Berdasarkan hasil sudi Mackerras (2012: 15) bahwa negara Cina telah mengintegrasikan kelompok minoritas dengan cukup baik, sehingga Cina berhasil menjadi negara yang efektif dalam integrasi nasional.

Untuk mewujudkan integrasi nasional diperlukan berbagai prinsip. Menurut Edosa (2014: 61) untuk mewujudkan integrasi nasional negara-negara bagian dari federasi Nigeria memberikan persyaratan minimum terkait kewarganegaraan atau penerimaan masyarakat non-pribumi secara kolektif dan terdapat prinsip saling menghormati, kesetaraan dan kerja sama diantara kelompok etnis dan konstituen bangsa yang beragam.

Prinsip-prinsip tersebut digunakan untuk mewujudkan rasa kesatuan berwujud rasa persatuan bangsa, sehingga negara menjadi kokoh dan kuat.

Integrasi nasional menurut Birch (2012: 36-37) menjelaskan integrasi nasional sebagai suatu proses dari hasil dari perkembangan sosial dan ekonomi dan sebagai hasil dari kebijakan peraturan pemerintah. Dampak integrasi nasional yang tidak direncanakan adalah mobilisasi sosial.

Pada proses *nation building*, menurut Birch (2012: 8-11) mengungkapkan sekelompok pemimpin politik yang memperoleh kekuasaan dapat membangun integrasi nasional. Cara untuk membangun integrasi nasional adalah pertama, mengonsolidasikan kontrol politik di daerah dengan melemahkan kekuatan internal, menjaga perbatasan, dan membentuk penegak hukum untuk menjaga ketertiban. Kedua, mengumpulkan pajak untuk membangun fasilitas dan penerapan hukum. Ketiga, membuat penciptaan sistem pendidikan yang mengajarkan materi identitas nasional, sejarah bangsa dan negara, dan menanamkan patriotisme secara langsung dan tidak langsung. Keempat, mengembangkan rasa kebanggaan nasional.

Menurut Penninx & Mascarenas (2016: 14-15) pada studinya integrasi imigran dan masyarakat Uni Eropa memberikan definisi dasar integrasi memiliki tiga dimensi analistik yang berbeda saat orang mungkin dan tidak mungkin menjadi bagian yang diterima dari masyarakat yaitu politik hukum, sosial-ekonomi, dan budaya keagamaan. Politik hukum berhubungan dengan tempat tinggal, hak dan status imigran yang menjadi anggota komunitas politik yang dapat berubah. Dimensi sosial-ekonomi mengacu pada posisi sosial dan ekonomi penduduk terlepas dari kewarganegaraan, sehingga posisi imigran dapat dilihat dari partisipasi

dalam domain yang penting bagi setiap penduduk. Selain itu, Dimensi budaya agama berkaitan dengan persepsi dan praktik imigran dan masyarakat penerima serta adanya reaksi timbal balik terhadap perbedaan dan keragaman.

Struktural dan afektif dapat terintegrasi dengan baik. Integrasi nasional kokoh adanya konsensus nasional yang menjadi cita-cita bersama. Cita-cita bersama menjadi pemersatu dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsensus ini membawa ke arah pemersatu bangsa. Konsensus akan menjadi dasar negara sebagai nilai dalam penyelenggaraan negara. Menurut Weiner (Surbakti, 2010: 65-70) menjelaskan pembagian integrasi politik dalam lima tipe integrasi antara lain integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, Integrasi elite dengan khalayak, dan perilaku integratif. Integrasi bangsa sebuah proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya yang mejemuk membentuk kesatuan wilayah. Integrasi bangsa berupa gabungan dari berbagai unsur masyarakat yang menjadi satu kesatuan yang utuh dan erat.

Proses integrasi nasional dapat tercapai dengan adanya empat argumen yang mendukung proses integrasi nasional menurut Birch (2012: 37-40) yaitu kebutuhan historis, adanya asimilasi sosial, perwakilan harus melaksanakan pemerintahan atas dasar persatuan nasional, dan faktor yang mendukung integrasi nasional adalah basis aman dari kekuasaan atau otoritas politik. Berdasarkan uraian yang disajikan bahwa integrasi nasional berupa penyatuan kelompok minoritas dengan kelompok mayoritas yang berkomitmen menjadi satu. Tekad bangsa untuk bersatu adanya tujuan, kepentingan bersama yang menjadi dasar integrasi nasional. Selain itu, integrasi nasional sebuah peleburan daerah menjadi loyalitas bersifat nasional. Integrasi nasional

perlu dijaga melalui *nation building* untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara.

Ulama memiliki kekuatan dan kekuasaan terhadap jamaah atau masyarakat luas. Sehingga Ulama dapat berperan penting dalam kehidupan kerukunan, keharmonisan dan *nation building*. Ulama sepuh dalam artikel ini dijelaskan sebagai pemuka agama islam yang secara usia dan kemampuan sudah tua, beliau memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Ulama dipandang sepuh salah satunya ialah pemimpin pondok pesantren Darussalam yaitu Mbah Kyai Dalhar dan Mbah Kyai Mad Watucongol. Beliau adalah keturunan dari pendiri Pondok Pesantren Darussalam KH Abdurrauf, yang beliau dirikan pada tahun 1830 masehi. Beliau memiliki keistimewaan yang dapat memberikan pengaruh pada pendidikan pondok pesantren dan pendidikan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dari sisi kontribusi ulama sepuh dalam kenegaraan di Indonesia untuk mewujudkan integrasi nasional dalam mempertahankan negara yang kuat dan kokoh. Kesatuan Indonesia berasal dari pengalaman mereka peroleh bersama, bukan berdasarkan pada suatu budaya dan bahasa yang sama. Kebangsaan Indonesia tidak alami, sehingga Soekarno menekankan perlu adanya *nation building*. Kebangsaan Indonesia perlu dipelihara, dirangsang, dikembangkan dan diperdalam. Perlunya untuk proses *nation building* yang terpelihara.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif sebuah proses untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai sebuah fenomena pernah terjadi. Menurut Moleong (2012: 6) penelitian kualitatif sebuah usaha untuk memahami fenomena tantang apa yang menjadi pengalaman oleh

subjek penelitian. Sedangkan menurut Sugiyono (2013: 347) penelitian kualitatif lebih natural dalam proses mengali informasi atau pengetahuan. Penelitian kualitatif dianggap sebagai proses untuk mengali dan memahami perilaku dan tingkah laku yang terdapat pada individu dan kelompok.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Whitnet (Nasir, 1988: 63) penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi tepat. Deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan keadaan umum objek, sasaran, dan lokasi mengetahui tentang peran ulama sepuh Magelang dalam mewujudkan integrasi nasional.

Tempat Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Darussalam Magelang. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada lurah pondok dan pengurus pondok pesantren Darussalam. Jenis data penelitian ini adalah kualitatif. Teknik analisis data menggunakan model miles and Huberman (Sugiyono, 2013: 334-343), yaitu reduksi data, data display, dan Conclusion Drawing/ Verification. Uji keabsahan data dengan menggunakan triangulasi data. Triangulasi dapat berguna untuk menghasilkan data lebih terpercaya. Menurut Sugiyono (2013) triangulasi data berupa pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Triangulasi pada penelitian ini untuk pengecekan antara wawancara, observasi, dan dokumentasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Peran Ulama dalam Sejarah Perjuangan Bangsa

Sebelum terbentuknya negara kesatuan republik Indonesia, wilayah nusantara dijajah diantaranya oleh negara Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Negara Belanda yang lama

menjajah wilayah nusantara yang mengakibatkan kesengsaraan dan kemiskinan. Pola penjajahan Belanda ialah dengan bekerja sama dengan penduduk, priyayi, atau tokoh daerah. Dengan imbalan kekayaan dan kekuasaan. Hal ini yang membuat penjajahan Belanda berkuasa lama di Indonesia. Selain itu, politik *divide et impera* telah membuat permusuhan dan peperangan antar kerajaan.

Ikut campur Belanda dalam kerajaan Kraton Yogyakarta, sehingga terdapat pertentangan hukum adat dan agama yang berlaku. Selain itu, bangsawan Istana dan pejabat Belanda yang bersikap sewenang-wenang membuat rakyat sengsara (Yamin, 1952: 16). Membuat Pangeran Diponegoro meninggalkan keraton Yogyakarta dan perlawanan terhadap Belanda. Pangeran Diponegoro tinggal di Tegalrejo, Magelang.

Pada pertengahan tahun 1825, Belanda dan Patih Danuredja IV berencana membuat jalan yang melewati tanah Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Namun, karena tidak meminta izin kepada Pangeran Diponegoro, sehingga memicu terjadinya perang jawa atau Diponegoro. Banyak Dukungan yang muncul dari berbagai pihak, bangsawan, tokoh masyarakat, ulama, santri, dan rakyat jelata.

Basis keagamaan yang diwakili oleh ulama dan santri turut mendukung perjuangan melawan Belanda. Berdasarkan wawancara Adib (21 Juli 2021) lurah Pondok Pesantren Darussalam bahwa secara sisi sejarah bahwa ulama ikut menjaga dan mempertahankan wilayah Magelang. Secara sisi sejarah menceritakan bahwa Kiai Abdurrauf membantu perang Diponegoro dalam perang Jawa. Kiai

Abdurrauf dikenal sebagai panglima perang Diponegoro yang menjaga kawasan Magelang. Magelang sebagai jalur strategis ekonomi yang menghubungkan antara Yogyakarta dengan Temanggung dan Semarang. Untuk menjaga wilayah Magelang, Kiai Abdurrauf tinggal di Dukuh Tempur, Desa Gunung Pring, Muntilan.

Pada tahun 1830 Kiai Abdurrauf mendirikan Pondok Pesantren Darussalam untuk mengajar ilmu agama. Pendirian pondok pesantren menjadi bukti perjuangan dakwah dan militer Kiai Abdurrauf. Kyai Abdurrauf Magelang menjadi salah satu pionir terbentuknya kembali jaringan ulama nusantara baik di tingkat lokal maupun internasional (Dhofier, 2015).

Perjuangan dakwah dan militer dilanjutkan oleh Kiai Dalhar. Kiai Dalhar ialah cucu dari Kiai Abdurrauf. Kiai Dalhar berjuang mengawal santri untuk berjuang pada masa kemerdekaan. Beliau menjadi pimpinan pondok pesantren Darussalam dengan memiliki karisma dan ilmu agama yang diakui banyak kalangan. Dalam jaringan ulama nusantara bahwa Kiai Dalhar menjadi rujukan keilmuan, perjuangan, dan sufisme dalam pesantren.

Tahun 1914 KH Wahab Chasbullah dan KH Mas Mansyur mendirikan kelompok keagamaan yang berhasil menarik kalangan islam tradisional dan para tokoh nasionalis-sekuler yaitu dr Sutomo. Kemudian terbentuknya kelompok kerja yang disebut Nahdlatul Wathan atau kebangkitan tanah air (Bizawe, 2016). Pergerakan ini melahirkan madrasah dengan corak nasionalis-moderat yang tersebar di daerah Jawa Timur yang

dipimpin oleh kedua Kiai tersebut. Setelah itu KH Wahab dan Abdullah Ubaid membentuk sebuah organisasi pemuda muslim bernama Syubabhanul Wathan (pemuda tanah air) di Surabaya. Kemudian muncul kesepakatan pada ulama pesantren, dan terbentuknya Nahdlatul Ulama (kebangkitan ulama). Berdiri pada tahun 1926 di kota Surabaya yang dipimpin oleh KH Hasyim Asy'ari (Dhofier, 2015)

Seruan resolusi jihad yang dihasilkan oleh ulama dan santri terjadi pada 22 Oktober 1945. Ulama dan santri dari berbagai daerah berkumpul di Surabaya. Resolusi jihad ini didasarkan pada dalil agama yang mewajibkan setiap muslim untuk mempertahankan negara dari penjajah (Fauzi, 2018). Ulama memiliki peran yang besar dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, dapat mempersatukan umat islam dan ikut serta dalam menjaga pertahanan negara.

b. Peran Ulama Memperkuat Ideologi Nasional

Terbentuknya Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan memerikan dampak terbentuknya organisasi kepemudaan yang menjadi bagian dari organisasi ini. Organisasi yang terbentuk, yaitu terdapat Banser dan Ansor. Banser adalah badan otonom dibawah GP Ansor. GP Ansor awal bermula dari organisasi syubbanul Wathan (Pemuda Tanah Air) yang berdiri pada tahun 1924. Organisasi ini memiliki tugas mengawal gerakan sosial di masyarakat. Sementara, Banser bergerak di bidang pengamanan dan kemasyarakatan.

Pada tahun 2018 silam GP Ansor dan Banser melakukan apel Kebangsaan. Komitmen GP Ansor dan Banser untuk menjaga NKRI, Bhineka Tunggal Ika, Pancasila, dan UUD 1945 diutarakan oleh ketua GP Ansor Gus Yaqut (CNN, 2018). GP Ansor dan Banser tunduk dan patuh terhadap peraturan yang ada di negara Indonesia, jarang terjadi gangguan keamanan terhadap negara.

Organisasi ini memiliki peran untuk menjaga persatuan dan kesatuan umat. Adanya toleransi antar umat beragama, dan ikut serta mengamankan pada perayaan hari raya natal. Pada tahun 2019 terdapat serangan bom di gereja Mojokerto yang menewaskan anggota Banser (CNN, 2019). GP Ansor dan Banser ikut serta menjaga kerukunan, dan hidup berdampingan antar umat beragama.

- 1) Kegiatan kepemimpinan melalui Banser dan GP Ansor
Santri pondok pesantren Darussalam mulai mengenal organisasi dan kepemimpinan melalui Banser dan GP Ansor. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Pak Adib Lurah Pondok menjelaskan bahwa kegiatan kepemimpinan dan organisasi dibentuk melalui kegiatan GP Ansor dan Banser Kecamatan Salam. Pada masa Pandemi saat ini kegiatan tetap dilakukan. Untuk memberikan bekal dan kemampuan santri untuk dapat mengenalkan kepemimpinan.
- 2) Materi *Ahlussunnah wal jamaah* NU sebagai pengantar tentang pemerintahan Indonesia.

Pondok pesantren Darussalam tidak menjadi bagian dari politik praktis. Pendidikan politik yang dilakukan pondok pesantren dengan memperkenalkan materi *Ahlussunnah wal jamaah* Pada tingkatan pendidikan dasar. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Pak Miftah bahwa materi *Ahlussunnah wal jamaah* diberikan kepada siswa tingkat dasar untuk memperkenalkan gerakan organisasi NU. *Ahlussunnah wal jamaah* memberikan logika dan sikap kebangsaan. Logika NU dan sikap cinta tanah air organisasi NU adalah hasil dari pemikiran para ulama *Ahlussunnah wal jamaah* dalam memandang relasi agama dan negara. Para ulama mengungkapkan bahwa kehidupan dunia tidak terpisahkan dengan kehidupan beragama islam.

- 3) Materi Agama yang berkaitan dengan Integrasi nasional
 Pondok pesantren Darussalam merupakan pondok pesantren salafiyah yang mengkaji kitab kuning. Kitab kuning berisi tentang fikih, akidah ahlak, tasawuf, hadis, hukum islam dan tafsir. Berdasarkan wawancara kepada Pak Adib lurah Pondok bahwa pendidikan pondok tidak mengajarkan materi mengenai kerukunan, toleransi, dan integrasi nasional. Namun, melalui belajar kitab kuning santri secara langsung sudah memiliki sikap kerukunan, toleransi, dan menjaga integrasi nasional. Belajar kitab kuning ini dilakukan pada tingkat pendidikan madrasah tsanawiyah. Seorang santri apabila belajar

ilmu kitab kuning dapat mempelajari ilmu dunia dan akhirat.

- a. Peran Ulama dalam Paham Pluralisme dan Multikulturalisme

Awal kedatangan agama islam ialah dengan mengganti kebiasaan animisme dan dinamisme. Agama islam di Jawa disebarluaskan oleh walisongo melalui dakwah kebudayaan. Percampuran budaya yang terjadi di nusantara terjadi pada saat masuknya Islam di tanah jawa. Hal ini memudahkan Islamisasi di Indonesia. Karakter ulama yang sangat toleran terhadap budaya lokal, Memudahkan penyebaran agama Islam di Jawa dan Indonesia. Agama Islam dikenal dengan agama yang menerima tradisi lokal dan ikhtilaf ulama dalam memahami ajaran Islam.

Proses akulturasi budaya dan agama yang terjadi antara agama Islam dengan budaya lokal masyarakat dari tinggalan agama Hindu-Budha. Kebudayaan dan kebiasaan masyarakat jawa dengan memuja dewa, para dayang, dan berbagai hantu. Bentuk kebudayaan dengan upacara adat dan menyajikan sesajian. Penyebaran Islam yang dibawa oleh Sunan Kalijaga tidak mengganti tampilan ritualnya, namun secara pokok-pokok ritual dimasukkan ajaran-ajaran islam. Contohnya adalah sesajian pada peringatan orang meninggal diiringi dengan bacaan Tahlil dan yasin.

Perpaduan agama Islam dengan budaya dan kebiasaan masyarakat jawa membuat akulturasi. Hal ini menyebabkan perbedaan Islam yang lahir di Arab dengan Islam di Jawa, Islam di Arab kental dengan

tribalisme. Hal ini berbeda dengan kebudayaan yang berkembang di Jawa. Nahdlatul Ulama (NU) sebagai Islam tradisional melestarikan kebudayaan sudah ada di masyarakat dengan prinsip tidak bertentangan dengan Islam. Organisasi NU memegang teguh perjuangan Islam keindonesiaan sebagai bentuk kenyataan masyarakat Indonesia yang plural dan universal.

SIMPULAN

Ulama sebagai tokoh agama dan seseorang yang memiliki ilmu agama mendalam. Peran ulama sebagai tokoh agama, juga memiliki peran untuk menjaga persatuan, kesatuan, toleransi, dan negara kesatuan republik Indonesia. Peran ulama sepuh Magelang khususnya di pondok pesantren Darussalam memiliki peran dari sisi sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, penguatan ideologi negara, dan pengaruh Ulama dalam paham pluralisme dan multikulturalisme. Peran Ulama dapat memberikan pengaruh paham nasionalisme dan integrasi pada santri dan jamaah.

DAFTAR PUSTAKA

- Baton, M. (2010). National integration in France and Britain. *Journal of ethnic and migration studies*. 27 (1): 151-168. Retrived from: <https://doi.org/10.1080/13691830124752>.
- Birch, A.H. (2012). *Nationalism and national integration*. London: Unwin Hyman.
- Bizawe, Zainul Milal. (2016). *Masterpiece Islam Nusantara sanad dan Jejaring Ulamak Santri*, Ciputat Baru: Yayasan Comapas Indonesiatama,
- Dhofier, Zamakhasyari. (2015). *Tradisi Pesantren; Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya mengenai Masa depan Indonesia*, Jakarta: LP3ES,
- Edosa, E. (2014). National Integrastion, citizenship, political participation and democratic stability in Nigeria. *An International Journal of Art and Humanities*. 3 (3): 61-82. Retried
- Fauzi, A. (2018). Transkulturasi Social Capital Pesantren; Sebagai Paradigma Pendidikan. slam Moderat. In 2St Annual Conference For Muslim Scholars, *Strengthening The Moderate. Vision of Indonesia Islam* (Vol. II, pp. 751–765). Surabaya.
- Hasyim, Umar. (1998). *Mencari Ulama Pewaris Nabi*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Lacroix, C. (2010). *Imigrants, literature, and national integration*. London: Palgrave Macmillan.
- Laporan Human Right Watch. (2013). *Atas Nama Agama Pelanggaran Terhadap Mminoritas Agama di Indonesia*. USA: Human Rights Watch.
- Latif, Yudi. (2017). *Negara Paripurna (Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila)*. Jakarta: Gramedia.
- Liputan 6 SCTV. Tak Hanya FPI, Ini 6 Ormas Lain yang Juga Dibubarkan Pemerintah. Link <https://www.liputan6.com/news/read/4446539/tak-hanya-fpi-ini-6-ormas-lain-yang-juga-dibubarkan-pemerintah>. Diakses pada 21 Juli 2021
- Mackerras, C. (2012) China's minorities and national integration. Dalam Leong H. Liew and Shaoguang Wang, *Nationalism, democracy an national integration in China*. London: Routledge Curzon.

- Moleong, L.J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Yamin, (1952). *Sedjarah Peperangan Dipanegara*. Jakarta: Yayasan Pembangunan,
- Nasir. M. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Penninx, R. & Mascarenas, B.G. (2016). *The concept of integration as an analytical tool and as a policy concept. Dalam Blanca Garces Mascarenas & Rinus Penninx, integration processes and policies in Europe: centext, levels, and actors*. New York & London: IMISCOE.
- Subakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik: cetakan ketujuh*. Jakarta: Gramedia Widya Sarana.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Winarno. (2013). *Paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan (Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Sumber berita:

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191224133324-20-459607/antara-gus-dur-riyanto-banser-dan-bom-natal-mojokero>
diakses 31 Juli 2021

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181025170705-20-341448/sejarah-banser-barisan-pemuda-nu-pembela-bangsa>
diakses pada 31 Juli 2021